

KONSEPSI KEMITRAAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Oleh Drs. Teguh Soedarsono, S.H., M.Si. *)

Pendahuluan

Sesuai amanat GBHN 1993 ditentukan bahwa pembangunan jangka panjang II dilakukan dengan konsepsi Berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan. Hal ini menuntut upaya untuk menciptakan kualitas hidup yang baik dengan memperhatikan kondisi lingkungannya, termasuk di dalamnya kondisi dan mutu kebersihan lingkungannya.

Strategi pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya dilakukan sesuai amanat dan cita-cita pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, sehingga untuk itu diperlukan kegiatan pembangunan yang berkesinambungan dengan ditopang mutu dan dayadukung sumberdaya serta tatanan dan fungsi lingkungan hidup yang memadai.

Masuknya aspek lingkungan hidup dalam pembangunan nasional merupakan tuntutan global dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan manusia, juga merupakan kebutuhan utama dalam strategi pembangunan nasional yang ber-

kelanjutan, sehingga dengan keadaan tersebut memberikan pengaruh yang besar bagi proses pembangunan, sistem hukum, maupun sikap hidup masyarakatnya.

Konsep kemitraan dalam pembangunan sektor lingkungan hidup.

Upaya mengimplementasikan amanat GBHN dalam kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup merupakan tugas berat yang harus dilakukan oleh setiap aparat Pemerintah dan unsur masyarakat pelaku pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala dalam kemampuan dan jangkauan birokrasi dalam menjabarkan serta merealisasikan kebijakan pembangunan.

Bertolak dari keadaan tersebut di atas, maka kebijaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dititik beratkan pada upaya meningkatkan kemampuan, koordinasi, komitmen serta ketegasan setiap aparat pemerintah dengan dukungan dan peran serta lapisan masyarakat.

Dukungan dan peranserta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kepeduliannya terhadap kondisi serta upaya pengelolaan dan pembinaan mutu lingkungannya (*termasuk hal ini dalam upaya pengelolaan dan*

*) Penulis adalah Pamen Polri, Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup.

pembinaan kebersihan lingkungan), sehingga dari kepeduliannya tersebut dapat diserap berbagai pelibatangannya, baik berupa gagasan yang inovatif, kontribusi waktu, dana, fasilitas, maupun keikut. sertaannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatannya.

Pelibatan masyarakat dalam program kebersihan lingkungan dapat diwujudkan dalam kampanye pemasyarakatan dan aksi penggalangan kebersihan lingkungan, yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan melalui diskusi baik untuk menentukan arah, strategi dan sasaran program yang harus dilakukan, mekanisme kerja yang harus dipatuhi, jaringan informasi yang dapat digunakan, maupun koordinasi kegiatan yang harus dilakukan pada setiap tahapannya.

Dalam hal ini setiap pihak (*aparapemerintah maupun unsur masyarakat pelaku pembangunan*), sesuai peran, fungsi dan potensinya dituntut untuk :

- Mampu menangkap gerak dan arah dinamika dari kehidupan masyarakat, bangsa dan negaranya;
- Mau membuka mata hati dalam menilai berbagai fenomena kehidupan, yang kemudian secara nyata diaktualisasikan dalam pelaksanaan peran, fungsi, hak dan tanggungjawabnya bagi pembangunan lingkungan sekitarnya.

- Meningkatkan mutu kepemimpinan dan kaderisasi organisasinya demi kelangsungan, efektivitas dan efisiensi organisasi, sehingga dalam keberadaannya selalu mampu mengagregasi berbagai peluang dan getaran gerak pembangunan di lingkungannya;

- Mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas kehidupan lingkungannya, sekaligus mengaktualisasikan diri dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negaranya.

Dalam realitanya selama ini, pihak Pemerintah selalu bertindak sebagai pengatur, pengawas, dan penjaga ketertiban lingkungan, yang dalam prakteknya tidak jarang bertabrakan dengan berbagai kepentingan masyarakat yang selalu mencari peluang dan kesempatan dari berbagai aturan yang ditentukan pemerintah.

Keadaan ini sering menjadikan hubungan kerja antara pemerintah dan masyarakat menjadi tidak harmonis, sehingga akibat dari suasana yang kurang harmonis tersebut muncul berbagai praktek penyelewengan, antara lain praktek kolusi, monopoli, birokrasi yang kaku, tumpang tindih atau duplikasi aturan dan kelembagaan pengatur, yang kesemuanya itu mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan.

Dengan keadaan tersebut di atas, maka berbagai kebijakan dan kondisi

yang selama ini dirasakan kurang mendukung lancarnya pelaksanaan program pembangunan (termasuk di dalamnya program lingkungan hidup) harus segera disesuaikan sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi kelangsungan program pembangunan berkelanjutan.

Mekanisme kemitraan dalam program kebersihan lingkungan.

Dalam GBHN 1993 diamanatkan bahwa pembangunan untuk dapat dilaksanakan dengan lebih meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha, sedangkan peran pemerintah diharapkan lebih menjadi fasilitator dan motivator, penentu kebijakan, koordinator dan katalisator, serta penggerak pembangunan.

Oleh karena itu perlu diciptakan sistem dan kondisi untuk meningkatkan kemampuan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya menyusun dan menentukan format serta kaidah penataan ruang yang merupakan bagian dari konsepsi pembangunan di setiap daerah.

Untuk memadukan, menciptakan kerjasama, serta menumbuhkan dan mengembangkan kondisi kemitraan yang dinamis dalam pembangunan lingkungan, diperlukan upaya untuk mengubah dan membentuk sikap serta gaya hidup manusianya, meninjau kembali kebijakan dan strategi pembangunan, serta mengembangkan sistem kelembagaan yang mampu mendukung pembangunan

berkelanjutan, baik untuk kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakatnya.

Dalam upaya menumbuhkan iklim kemitraan yang mendasarkan pada prinsip peningkatan produktivitas, diperlukan kesadaran :

- Pada setiap anggota untuk memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan, rencana, dan operasional program pembangunan dan penataan lingkungan di wilayahnya;
- Pada setiap unsur untuk mau dan berusaha menyadari bahwa pencapaian tujuan dengan cara kerjasama fungsional merupakan tanggungjawab setiap pihak dan menjadi kunci keberhasilan ;
- Pada setiap anggota untuk mau memiliki kemampuan penyesuaian diri terhadap situasi yang diciptakan bersama, demi kepentingan bersama dan pencapaian tujuan yang disepakati ;
- Pada setiap pihak berusaha untuk membentuk suasana kemitraan kerja, sebagai kondisi yang mampu menggalang berbagai potensi, daya inovasi dan kemandirian semua pihak yang didasarkan pada prinsip kebetulan dan saling menguntungkan, sehingga untuk hal ini setiap pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus selalu berpegang pada etika sosial, etos kerja dan profesionalisme.

Tercipta dan berkembangnya kemitraan tersebut di atas akan memberikan pengaruh yang positif bagi dinamika, kemampuan dan ketaatan setiap pihak dalam pengelolaan dan peningkatan pembangunan lingkungannya.

Perangkat kemitraan dalam program kebersihan lingkungan

Untuk membentuk sistem kemitraan dalam kegiatan kebersihan lingkungan, perlu diciptakan dan ditumbuhkan iklim serta suasana kerja yang mendukung kemandirian, kreativitas, inovasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak, sehingga untuk hal ini berbagai produk kebijakan dan program pemerintah yang selama ini ada dan dirasakan menjadi ketergantungan serta harus segera disesuaikan dengan mendasari prinsip kemitraan dan efektivitas yang bertanggungjawab.

Berbagai peranserta yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam program kebersihan lingkungan, antara lain :

a. Upaya meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam (dikenal dengan *Eco-efisiensi*), sehingga dari upaya tersebut diharapkan mampu meminimisasi limbah produksi yang dihasilkan, mengurangi timbunan sampah, serta mengurangi dampak kerusakan lingkungannya.

Hal ini dapat dilakukan, antara lain dengan :

- Meningkatkan proses daur ulang limbah produksi, baik dalam tingkat produksi maupun tingkat konsumsinya.
 - Mengurangi penggunaan bahan kemasan produksi sekali pakai dan mudah terbuang langsung ke alam, namun sulit dihancurkan.
 - Menggunakan sumberdaya dan memproduksi barang dengan proses ramah lingkungan.
 - Melakukan pengolahan secara terencana terhadap limbah hasil produksinya.
- b. Menggunakan sarana teknologi dan manajemen produksi yang ramah lingkungan (dikenal dengan *Eco-technology* atau *Clean technology*).
- c. Menerapkan prinsip tanggungjawab mutlak terhadap dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari manajemen dan proses kegiatan usaha yang dilakukannya.
- d. Menjadikan materi sampah dan program kebersihan lingkungan sebagai peluang kegiatan usaha yang mampu mendatangkan manfaat dan profit bagi kemitraan yang dijalin, usaha maupun dirinya.
- Guna mewujudkan peranserta masyarakat dalam kebersihan lingkungan, beberapa perangkat yang dapat disiapkan pemerintah antara lain :
- Mengadakan akses informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan peraturan,

temuan teknologi, petunjuk penggunaan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan, data berbagai kegiatan usaha yang mampu memanfaatkan dan mengalirkan limbah produksi, dan sebagainya.

Dari akses informasi tersebut diharapkan mampu membuka daya inovasi dan kreativitas dalam berbagai kegiatan usaha yang ramah dan peduli terhadap kebersihan lingkungannya.

- Menerapkan sistem insentif dan disinsentif ekonomi, administrasi, maupun sosial bagi berbagai kegiatan usaha, sehingga dengan adanya sistem tersebut dapat termotivasi untuk melakukan kegiatan usaha yang peduli dan arif lingkungan ;
- Menerapkan sistem regulasi yang bersifat penataan dan mengarah pada sistem penataan (*Compliance*) kebersihan lingkungan, sehingga dengan sistem tersebut menjadikan setiap regulasi kebersihan sebagai *self regulation* yang harus dilakukan karena kebutuhan demi kelangsungan hidupnya ;
- Memberikan peluang dan tanggungjawab kepada para pelaku kegiatan usaha, baik berupa situasi, wahana ataupun kesempatan untuk menjadi rangsangan dan acuan model bagi pembentukan kesadaran, kepedulian, dan berpartisipasi dalam

kegiatan kebersihan di lingkungannya ;

Keberadaan masyarakat dalam program kebersihan lingkungan ini mempunyai peran ganda, yaitu di samping sebagai obyek yang selalu menuntut hak hidup yang lebih baik sehubungan dengan kewajiban yang telah dipenuhinya, juga sebagai subjek yang dituntut untuk mau dan mampu mengelola lingkungannya dengan baik.

Untuk mewujudkan, membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang mempunyai kemampuan, kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, perlu dikembangkan upaya antara lain :

- Meningkatkan sumberdaya manusia yang menyangkut pengetahuan, kemampuan, perilaku, dan semangat hidup masyarakat untuk mampu hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara baik dan berlanjut.
- b. Melembagakan, mengembangkan, mengkoordinasikan dan mengarahkan partisipasi aktif masyarakat dalam kebersihan lingkungan secara berdaya dan berhasil guna.
- c. Memberdayakan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, serta memberikan kesempatan untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di lingkungannya, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap peran pemerintah di bidang kebersihan

lingkungan semakin lama dapat dikurangi.

d. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat ikut memanfaatkan akses informasi yang tersedia, sehingga dengan kesadaran dan kepeduliannya mampu mengelola kebersihan di lingkungannya.

Dari berbagai aspek tersebut di atas, maka bentuk program dan perangkat yang harus segera mendapat perhatian bersama, adalah :

- Menyamakan persepsi dalam program kebersihan lingkungan di setiap wilayah, sehingga tujuan, strategi dan konsekuensi setiap pihak dalam manajemen dan kegiatan operasionalnya dapat terserap dengan pandangan yang sama.
- Melakukan analisis dan kajian objektif secara bersama terhadap permasalahan pelaksanaan kebersihan lingkungan, sehingga dari kegiatan tersebut dapat ditentukan isu atau masalah yang harus dilakukan secara prioritas, perbaikan yang dimau oleh semua pihak, serta ketegasan komitmen dan tanggungjawab setiap pihak dalam tindak lanjutnya.
- Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam keberhasilan pelaksanaan program kebersihan lingkungan, khususnya dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan daya

inovasi, kreativitas, kemandirian, dan kemauan instruktif dalam pelaksanaannya di lapangan.

- Mengembangkan teknologi alternatif dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, khususnya ditujukan pada teknologi mampu terpenuhi oleh daya ekonominya dan mampu menanggulangi keluhan kesehatan masyarakatnya, serta mampu meningkatkan pelestarian tatanan dan fungsi lingkungan hidup.
- Mengembangkan sistem jaringan informasi untuk meningkatkan kesinambungan kegiatan di lapangan, sehingga dari akses informasi tersebut dapat dibina dan dikembangkan kemampuan, kegiatan, dan kreativitas pengelolaan kebersihan lingkungan yang efektif dan lebih berhasil guna.
- Membina, mengembangkan dan memasyarakatkan kelembagaan pengelolaan kebersihan lingkungan yang didasari dengan kesadaran dan kepedulian lingkungan dari setiap anggotanya, sehingga diharapkan dari lembaga tersebut mampu meningkatkan kemampuan, ketrampilan, dan kemandirian masyarakatnya dalam menciptakan program kebersihan di lingkungannya.

P e n u t u p

Dari uraian tersebut di atas, maka secara ringkas dapat disimpul-

kan bahwa :

- Program kebersihan lingkungan di setiap wilayah harus dapat dilakukan dengan mendasari konsepsi kemitraan yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat, sehingga untuk hal itu agar berbagai kebijakan dan piranti yang dirasakan tidak mendukung harus segera disesuaikan.
- Dasari pelaksanaan program kebersihan lingkungan dengan kesadaran, kepedulian, dan tanggungjawab bersama, sehingga dalam hal ini setiap pihak harus mau berkewajiban untuk mengerti, menghargai, dan memperhatikan

keberadaan, peran serta fungsi pihak lainnya.

- Mekanisme dan berbagai perangkat kemitraan dalam program kebersihan lingkungan harus diselenggarakan dengan proses analisis secara berlanjut, sehingga dari keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya bagi semua pihak.

Demikianlah materi ini disampaikan, kiranya dapat menjadi kontribusi yang positif bagi upaya lebih lanjut dalam membina dan meningkatkan program kebersihan lingkungan dalam rangka memelihara mutu dan fungsi lingkungan hidup.



PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

Jalan Palatehan No. 5, Kebayoran Baru - Jakarta 12160
Telp. 7204021, 7204022, 7204023, 7204025, 7204026, 7204027
Fax. (62 - 21) 7222253

*Sarana Penunjang Peningkatan Kesejahteraan Warga Polri
Bergerak Dalam Segala Macam Asuransi Kerugian*

*Mengucapkan
Hari Bhayangkara
1 Juli 1995*

KANTOR CABANG :

BANDUNG : Jl. Tamblong No. 26 BANDUNG 40111
Telp. 4200450 - 436928 Fax. (022) 434926

SURABAYA : Jl. Raya Arjuna No. 78 B SURABAYA 60251
Telp. 525813 Fax. (031) 525814

SEMARANG : Jl. Cendrawasih Blok C-5 Komplek Perkantoran
Jurnatan SEMARANG 50121
Telp. 545393 Fax. (024) 545393

DAN PERWAKILAN/UNIT-UNIT PELAKSANA DAERAH